



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2011 - 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Statejik (Renstra) badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana merupakan gambaran secara umum tentang visi, misi, serta kebijakan-kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahapan 5 (Lima) tahun kedepan .

Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagai salah satu instansi milik pemerintah, merupakan perpanpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan penduduk semakin tinggi menyebabkan kompleksitasnya permasalahan - permasalahan yang timbul, sementara sumber daya manusia yang dimiliki (skill) dan kemampuan sangat terbatas sehingga sulit untuk keluar dari permasalahan yang ada. Faktor ekonomi yang semakin tidak seimbang dengan laju pertumbuhan yang ada. Mengkibatkan semakin sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan dan perlindungan terhadap kekerasan bagi anak perempuan. Kabupaten banggai sebagai daerah menuju perkembangan banyak menghadapi tantangan antara lain tingkat kesejahteraan penduduk belum tercapai secara menyeluruh sehingga upaya-upaya untuk menjawab tantangan itu harus dilaksanakan secara bertahap.

Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia khususnya kaum perempuan, anak-anak serta kelrga yang merupakan unsure penting terbentuknya suatu masyarakat, badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana adalah suatu badan milik pemerintah yang memiliki kewenangan dan mendapat amanat oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan program dalam hal pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan, anak-anak serta keluarga berencana.

Melalui rencana startejik ini diharapkan dapat menjadi barometer bagi badan pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu penyusunan renstra ini diperlukan sehingga secara bertahap kinerja dari pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana akan lebih baik, terarah, terfokus, terencana dalam penyusunan pelaksanaan dan pencapaian tujuan kedepan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan rencana Stratejik ini didasarkan pada :

1. Undang -Undang nomor : 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bersih dari KKN
2. Undang-Undang nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
3. Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

4. Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan antar pemerintah pusat daerah.
5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi , dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
7. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Inpres no. 07 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
10. Perda nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten banggai.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan renstra ini adalah sebagai dokumen dari badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara bertahap dibawah pengendalian dari pemerintah daerah sehingga program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu sebagai perangkat dalam pengelolaan tugas dinas yang efektif dan efisien yang mampu berorientasi pada masa depan dengan melibatkan semua komponen yang ada.

Adapun tujuan penyusunan rencana Strategik ini adalah untuk menetapkan arah dan tujuan dari seluruh rangkaian kegiatan, kebijakan dan program-program untuk 5 (Lima) tahun kedepan sesuai dengan visi, misi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana menuju Banggai yang sejahtera.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penyusunan rencana Strategik ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
- B. Telah Visi - Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- C. Telah Renstra K/ L dan Renstra SKPD Provinsi
- D. Telah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
- E. Penentuan Isu - isu Strategis

BAB IV VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah SKPD
- C. Strategi dan Kebijakan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBARDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

1. Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- b. Penyusunan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- c. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- d. Pengolahan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati.

2. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian dan Aset
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Program
- c. Bidang keluarga berencana, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pelyanan KB
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan Kesehatan Reproduksi
- d. Bidang Keluarga sejahtera, meliputi :
 - 1) Sub bidang pengembangan ketahanan keluarga
 - 2) Sub bidang perlindungan perempuan
- e. Bidang pemberdayaan perempuan meliputi
 - 1) Sub bidang pembinaan kelembagaan perempuan
 - 2) Sub bidang perlindungan perempuan
- f. Bidang perlindungan anak, meliputi :
 - 1) Sub bidang pembinaan anak
 - 2) Sub bidang kesejahteraan anak
- g. UPT
- h. Kelompok jabatan fungsional

B. URAIAN TUGAS

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, tugas kepala badan meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pengendalian pelayanan KB dengan instansi terkait;
- d. Mengendalikan kewenangan badan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Melaksanakan kewenangan badan sesuai tugas dan tanggungjawab yang didelegasikan oleh bupati;
- f. Mengarahkan penyusunan program dan kegiatan badan berdasarkan usulan bidang dan sekretariat;
- g. Memantau pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. Membina pelaksanaan ketatausahaan dan bidang-bidang teknis;
- i. Mengevaluasi setiap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana secara periodik.
- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi asset, program/kegiatan dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta pembinaan organisasi. Dengan uraian tugas sekretaris meliputi :

- a. Mengkoordinasikan segala kegiatan antara bidang dalam lingkup badan;
- b. Mengkoordinasikan, mengatur, dan membina kerja sama dalam pengurusan administrasi badan;
- c. Mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja badan;
- d. Mengkoordinasikan serta menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;

- e. Melaksanakan pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur badan;
- f. Mengatur urusan Tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian badan;
- g. Mengatur tata persuratan dan rumah tangga;
- h. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- i. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik badan;
- j. Memelihara keamanan dan ketertiban pada lingkungan badan;
- k. Mengelola dan mengurus perpustakaan badan;
- l. Melaporkan kegiatan sekretariat kepada kepala badan;

SEKRETARIAT TERDIRI DARI :

- Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan Dan Aset
- Sub Bagian Perencanaan Program

a. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan ketata usahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian badan. Uraian tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian meliputi :

- 1) Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan dengan berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian.
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
- 3) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, dan sarana/ prasarana kantor;
- 4) Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian, penerima tamu, kehumasan dan protokoler ;
- 5) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumatanggaan ;
- 6) Mengumpulkan, mengelola data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan badan ;
- 7) Memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi,/ hukuman dan pemberhentian/ pension serta pendidikan dan pelatihan pegawai ;

- 8) Menyiapkan bahan kordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan ;
- 9) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian ;
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada sekretaris.

b. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Kepala sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbaris kinerja serta pertanggungjawaban administrasi keuangan dan aset.

Uraian tugas kepala sub bagian keuangan dan aset, meliputi :

- 1) Mengumpulkan, mengola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas - tugas yang berkaitan dengan keuangan dan aset;
- 2) Melaksanakan analisis keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset badan;
- 3) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
- 4) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
- 5) Melaksanakan administrasi keuangan dan aset;
- 6) Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas dan bendahara pengeluaran;
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris;
- 8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian kepada sekretaris.

c. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

Kepala sub bagian perencanaan program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan program, pengendalian data, pembinaan evaluasi program/kegiatan badan;

Uraian tugas kepala bagian perencanaan program, meliputi:

- 1) Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secarah menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan badan;
- 2) Memfalitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik badan;
- 3) Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodok.
- 4) Menyiapkan dan menyusun dana penggunaan anggaran (DPA);
- 5) Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan badan;

- 6) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan tindakan badan serta menyiapkan tidak lanjut monitoring;
- 7) Menyipkan bahan dan memfalisasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten propinsi;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan badan dan menyusun LAKIP badan;
- 9) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sub bagian;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pada sekretaris.

3. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

Kepala bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas badan di bidang keluarga berencana berdasarkan kebijakan yang di tetapkan kepala badan.

Uraian tugas kepala bidang keluarga berencana, meliputi;

- a. Merencanakan kebijakan pelaksanaan program di bidang keluarga berencana;
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengendalian partisipasi pria dan pembinaan remaja;
- c. Memberi petunjuk pemberian jaminan, penilaian keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu bayi dan anak;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait penanganan medis aplikasi penenganan keluarga berencana;
- e. Mengevaluasi, memantau dan melaporkan kegiatan bidang keluarga berencana;
- f. Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja badan;
- g. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala badan.

BIDANG KELUARGA BERENCANA, TERDIRI DARI :

- Sub bidang pembinaan dan pelayanan KB
- Sub bidang penanggulangan kesehatan reproduksi

a. KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN KB

Kepala sub bidang pembinaan dan pelayanan KB mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pelayanan KB;

Uraian tugas kepala sub bidang pembinaan dan pelayanan KB, meliputi:

- 1) Merencanakan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan KB
- 2) Melaksanakan pembinaan institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga tehnis lapangan dalam pembinaan dan penanganan KB.
- 3) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pembinaan dan pelayanan KB.
- 4) Melaksanakan pengendalian kegiatan pembinaan dan pelayanan KB.

- 5) Mengevaluasi, memantau dan melaporkan kegiatan sub bidang pembinaan dan pelayanan KB.
- 6) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sub bidang;
- 7) Melaporkan kegiatan sub bidang kepada kepala bidang.

b. KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN KESEHATAN REPRODUKSI

Kepala sub bidang penanggulangan kesehatan reproduksi mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga berencana dalam melaksanakan tugas melaksanakan penanggulangan kesehatan reproduksi;

Uraian tugas kepala sub bidang penanggulangan kesehatan reproduksi, meliputi :

- 1) Merencana kebijakan pelaksanaan penanggulangan kesehatan reproduksi;
- 2) Melaksanakan pembinaan institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga teknis lapangan dalam penanggulangan kesehatan reproduksi;
- 3) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan penanggulangan kesehatan reproduksi;
- 4) Melaksanakan kegiatan pengendalian dalam hal penanggulangan kesehatan reproduksi;
- 5) Mengevaluasi, memantau dan melaporkan kegiatan sub bidang penanggulangan kesehatan reproduksi;
- 6) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sub bidang;
- 7) Melaporkan sub bidang kepada kepala bidang;

4. KEPALA BIDANG KELURGA SEJAHTERA

Kepala bidang keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas badan di bidang keluarga sejahtera berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala badan.

Uraian tugas kepala bidang keluarga sejahtera, meliputi:

- a. Merencanakan kebijakan pelaksanaan program keluarga sejahtera;
- b. Mengatur program melaksanakan pengendalian, advokasi, komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta;
- c. Mengatur program dan melaksanakan pengendalian, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- d. Membina kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat lainnya menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. Mengevaluasi, memantau dan melaporkan kegiatan di bidang keluarga sejahtera;
- f. Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja bidang;
- g. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala badan

BIDANG KELURGA SEJAHTERA, TERDIRI DARI :

- Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga

- Sub Bidang Pembinaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi

a. KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA

Kepala sub bidang pengembangan ketahanan keluarga, mempunyai tugas membantu kepala bidang keluarga sejahtera dalam melaksanakan tugas di bidang keluarga sejahtera.

Uraian tugas kepala sub bidang pengembangan ketahanan keluarga, meliputi :

- 1) Merencanakan pelaksanaan program pengembangan ketahanan keluarga;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan ketahanan keluarga;
- 3) Melaksanakan program pengembangan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- 4) Melaksanakan pengendalian kegiatan pengembangan ketahanan keluarga;
- 5) Mengevaluasi, memantau dan melaporkan kegiatan sub bidang pengembangan ketahanan keluarga.
- 6) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sub bidang;
- 7) Melaporkan kegiatan sub bidang kepada kepala bidang

b. KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI

Kepala sub bidang pembinaan komunikasi informasi dan edukasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga.

Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, meliputi :

- 1) Melaksanakan program institusi dan peran serta melalui kerja sama antar lembaga dan tenaga lini lapangan dalam pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- 2) Melaksanakan program pemberdayaan serta pembinaan komunikasi informasi dan edukasi dalam hal upaya keluarga sejahtera;
- 3) Mengevaluasi, memantau dan melaporkan kegiatan pembinaan komunikasi informasi dan edukasi;
- 4) Melaksanakan sosialisasi menyangkut upaya keluarga sejahtera;
- 5) Mengevaluasi dan mengembangkan kinerja sub bagian;
- 6) Melaporkan kegiatan sub bidang kepada Kepala Bidang.

5. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan di Bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, meliputi :

- a) Melaksanakan kegiatan rintisan pemberdayaan perempuan dan organisasinya;

- b) Membimbing peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat dan organisasi perempuan;
- c) Menyebarluaskan informasi, promosi tentang kesadaran dan keadilan pemberdayaan perempuan;
- d) Memberikan bimbingan teknis dan perluasan lapangan kerja kewirausahaan;
- e) Memediasi penanganan sengketa kekerasan terhadap kaum perempuan;
- f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
- g) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- h) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja bidang;
- i) Melaporkan kegiatan bidang kepada Kepala Badan.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, TERDIRI DARI :

- Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan
- Sub Bidang Perlindungan Perempuan

a. KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PEREMPUAN

Kepala sub bidang pembinaan kelembagaan perempuan mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan rintisan pembinaan kelembagaan perempuan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan, meliputi :

- 1) Melaksanakan kebijakan pelaksanaan program di bidang pembinaan kelembagaan perempuan;
- 2) Melaksanakan program institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan di bidang pembinaan kelembagaan perempuan;
- 3) Melaksanakan pembinaan pemberdayaan organisasi yang bergerak di bidang kelembagaan perempuan;
- 4) Melaksanakan pengendalian program sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- 6) Melaporkan kegiatan sub bidang kepada Kepala Bidang

b. KEPALA SUB BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan.

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan, meliputi :

- 1) Melaksanakan program institusi dan peran serta melalui kerjasama antar lembaga di bidang perlindungan perempuan;
- 2) Melaksanakan pengendalian program perlindungan perempuan;

- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan;
- 4) Memfasilitasi penanganan sengketa akibat kekerasan terhadap kaum perempuan;
- 5) Memantau pelaksanaan kegiatan yang bertalian dengan upaya perlindungan perempuan;
- 6) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sub bidang;
- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- 8) Melaporkan kegiatan sub bidang kepada Kepala Bidang.

6. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang perlindungan anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.

Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Anak, meliputi :

- a. Menyusun dan merencanakan kebijakan teknis dan oprasional di Bidang perlindungan anak;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis di Bidang Perlindungan Anak;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penanganan anak dengan institusi terkait;
- d. Memediasi penanganan masalah akibat kekerasan terhadap anak;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis di bidang perlindungan anak;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- g. Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja bidang;
- h. Melaporkan kegiatan bidang kepada Kepala Badan

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK TERDIRI DARI :

- Sub Bidang Pembinaan Anak
- Sub Bidang Kesejahteraan Anak

a. KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN ANAK

Kepala Sub Bidang Pembinaan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pembinaan anak.

Uraian tugas kepala Sub Bidang Pembinaan Anak, meliputi :

- 1) Menyusun kebijakan teknis pembinaan anak sebagai pedoman kerja;
- 2) Menginventarisir dan menyusun data anak bersama instalasi terkait sebagai bahan untuk pembinaan anak;
- 3) Menyiapkan data dan memfasilitasi kegiatan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut tindak lanjut terhadap pembinaan anak;
- 4) Memfasilitasi kegiatan - kegiatan yang bertalian dengan pembinaan dan penanaman kepercayaan diri terhadap anak;

- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- 6) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sub bidang;
- 7) Melaporkan kegiatan sub bidang kepada Kepala Bidang.

b. KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN ANAK

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak melaksanakan tugas yang bertalian dengan kesejahteraan anak.

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Anak, meliputi :

- 1) Menyusun kebijakan teknis penanganan kesejahteraan anak sebagai pedoman kerja;
- 2) Menyusun rencana program dan kegiatan yang bertalian dengan upaya peningkatan kesejahteraan anak;
- 3) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait upaya - upaya yang bertalian dengan peningkatan kesejahteraan anak;
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan anak;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- 6) Mengembangkan dan mengevaluasi kinerja sub bidang;
- 7) Melaporkan kegiatan sub bidang kepada Kepala Bidang.

7. SUMBER DAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

Aparatur pegawai negeri sebagai pelaksana tugas pelayanan dibidang pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja dinas. Oleh karena itu, kualifikasi, pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku aparatur hendaknya sesuai dengan yang diperlukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana didalam melaksanakan tugasnya.

Keadaan Tenaga / Pegawai :

Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana keseluruhannya berjumlah : 59 orang

a. Berdasarkan Jabatan / Struktural

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1) Tenaga Esalon II | : 1 Orang |
| 2) Tenaga Esalon III | : 5 Orang |
| 3) Tenaga Esalon IV | : 10 Orang |
| 4) Tenaga Non Esalon | : 13 Orang |
| 5) KUPT | : 12 Orang |
| 6) Tenaga Fungsional (PKB) | : 18 Orang |
| 7) PHL | : 8 Orang |

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| | |
|-------------------|------------|
| 1) S2 (Strata 2) | : 5 Orang |
| 2) S1 (Strata 1) | : 21 Orang |
| 3) D3 (Diploma 3) | : 2 Orang |
| 4) D2 (Diploma 2) | : - |
| 5) D1 (Diploma 1) | : 1 Orang |
| 6) SMU/SMA | : 26 Orang |
| 7) SLTP | : 1 Orang |

C. KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Saat ini kondisi kinerja dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam bidang pelayanan sudah berjalan sesuai target yang diharapkan, namun ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu sarana dan prasarana pendukung, selain itu juga diklat - diklat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pegawai sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Adanya ancaman merupakan suatu jawaban yang dijadikan tantangan untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Ancaman yang dihadapi dalam pengembangan suatu daerah diantaranya adalah :

- a. Persaingan bebas baik antara daerah maupun luar negeri
- b. Kemajuan teknologi yang sangat cepat
- c. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi
- d. Pergeseran penggunaan lahan

Dengan tantangan yang ada maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Badan yang memiliki kewenangan dalam hal pembinaan, perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan, anak dan keluarga berencana juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dimana laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang mengakibatkan kehidupan yang layak bagi keluarga dan perlindungan terhadap anak dan perempuan semakin sulit terjangkau.

Selain itu masyarakat juga enggan untuk mengkomunikasikan hal - hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kekerasan bagi wanita dan anak - anak sehingga sulit untuk difasilitasi guna memperoleh bantuan hukum dan perlindungan. Begitu juga dari segi tenaga / aparat masih lemah dalam hal kualitas sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal.

Dengan adanya ancaman tersebut merupakan peluang yang dapat memacu Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu badan yang dapat mengembangkan system pelayanan yang ada dengan metode - metode yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar lebih dikembangkan lagi program - program yang sangat menyentuh lapisan masyarakat miskin dengan penguatan kelembagaan, pemberdayaan Perempuan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk memperoleh harapan - harapan dimana jumlah penduduk semakin menurun dan perekonomian semakin meningkat.

Selain itu adanya pengelolaan potensi daerah yang makin berkembang memacu pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi untuk memperoleh kehidupan yang layak, masuknya para investan asing dalam bentuk modal usaha memberikan kesempatan bagi penduduk local untuk memperoleh pendapatan dengan kehidupan yang lebih baik.

BAB III
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. PERMASALAHAN

Masalah yang timbul ataupun dirasakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan upaya - upaya program pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan PPKBD dan Sub PPKBD yang menjadi kader program KB kurang maksimal
- b. Kerjasama lintas sector terlihat dalam upaya - upaya pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak belum maksimal
- c. Dukungan oprasional dalam peningkatan pelayanan KB dan Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak kurang atau tidak ada
- d. Sumber daya masyarakat maupun aparatur BPP-KB masih kurang maksimal
- e. Aktifitas kegiatan kelompok ketahanan keluarga BKB dan BKR dilihat dari tingkat pelaporan kegiatan masih rendah, demikian juga dengan tingkat kehadiran keluarga yang aktif mengikuti pertemuan untuk BKB masih kurang
- f. Akses bantuan modal bagi kelompok UPPKS yang anggotanya seluruhnya perempuan dan keluarga prasejahtera sangat terbatas
- g. Dukungan dana dari APBN melalui BKKBN propinsi yang bersifat dana perbantuan dengan pola droping, yang sering tidak tepat waktu dalam mendukung oprasional lapangan
- h. Terbatasnya pelatihan - pelatihan keterampilan untuk kaum wanita buta aksara dan putus sekolah
- i. Penyetaraan gender dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial belum merata
- j. Perlindungan terhadap KDRT belum sepenuhnya terdeteksi

2. PEMECAHAN

Bentuk dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan pelayanan PPKBD dan Sub PPKBD sebagai kader program KB dengan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
- b. Mengiatkan kerjasama lintas sektor dalam upaya - upaya pelayanan terhadap keluarga berencana dan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak yang bertujuan memberikan pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai melalui Pemda setempat mengupayakan agar memperoleh dukungan melalui APBN lebih ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan oprasional sehingga pelayanan optimal lagi

- d. Mengiatkan sumber daya masyarakat maupun aparat BPP-KB dengan berbagai program dan kegiatan yang bertumpu pada kemampuan dan keahlian.
- e. Rata - rata tingkat usaha kelompok UPPKS, pada usaha kecil/bakulan dan home industri (sifat pembelajaran peningkatan usaha keluarga bagi keluarga miskin) yang tidak mampu mengakses permodalan di lembaga perkreditan karena persyaratan administrasi dan agunan, perlu pembinaan usaha
- f. Mengembangkan usaha kelompok UPPKS dengan melihat potensi wilayah
- g. Dukungan dana dari APBN melalui BKKBN propinsi bersifat dana perbantuan dengan pola droping, yang sering tidak tepat waktu dalam mendukung oprasional lapangan
- h. Memberikan pelatihan - pelatihan keterampilan home industri yang sifatnya dapat menggerakkan dan memberdayakan perempuan yang tidak memiliki pendidikan dan putus sekolah
- i. Dukungan dari dunia usaha untuk memberikan kesempatan kepada para wanita untuk bersaing dalam dunia dengan para laki - laki
- j. Mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang bantuan perlindungan hukum bagi korban KDRT

B. TELAHAH VISI - MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Sebagai daerah yang berkembang Kabupaten Banggai memiliki potensi alam yang sangat kaya, daerah yang majemuk dengan beragam adat - istiadat merupakan salah satu unsure yang penting untuk sebuah daerah yang dalam proses membangun.

Dengan visi - misi yang di usung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama lima tahun kedepan, visi yang ditawarkan yaitu :

“ MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016 ”

Dengan melihat visi yang di usung oleh Kepala Daerah terpilih bahwa penataan pembangunan dititik beratkan pada peningkatan perekonomian masyarakat, dengan mengiatkan ekonomi produktif.

Mengingat potensi sumber daya alam Kabupaten Banggai yang cukup besar dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Yang juga sebagai prioritas sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan visi yang ada harus sejalan dengan misi sehingga dapat tercipta program pembangunan yang terarah, sistematis dan sesuai dengan kondisi social masyarakat Kabupaten Banggai.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang di usung oleh pemimpin terpilih khususnya terhadap seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banggai mulai dari desa hingga ke kota dengan menitik beratkan prioritas pada perekonomian dan kesehatan serta pendidikan.

Urgensi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai dengan program dan kegiatan yang ada dimana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah memberikan jaminan seluruh masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah (Masyarakat Miskin) dalam memperoleh pelayanan kesehatan khususnya program pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan pemberdayaan perempuan di segala sector yang sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Selain itu visi dan misi pemimpin yang baru yaitu menjadikan Banggai yang sejahtera dalam kehidupan masyarakatnya yaitu dengan membangun dan membuka kerjasama dengan pihak - pihak yang kompeten sehingga banyak lapangan pekerjaan terbuka dan memberikan peluang yang sebesar - besarnya pada masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang lebih layak. Dengan demikian angka kemiskinan dapat ditekan.

C. TELAAH RENSTRA K / L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal ini tiap tahun menjadi prioritas karena maju mundurnya suatu daerah atau berhasil tidaknya suatu daerah dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetibel.

Melihat program yang ditawarkan adalah pengendalian kuantitas penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Cakupannya adalah menciptakan masyarakat yang berkualitas dengan mewujudkan jaminan kesehatan, keluarga sejahtera sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.

Peningkatan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat prasejahtera menjadi sebuah tantangan yang harus mendapat jawaban dan prioritas utam karena keberhasilan pemimpin dilihat dari capaian kinerja yang menjadi prioritasnya.

Urgensi dari renstra propinsi dan renstra kabupaten pada dasarnya adalah saling terkait, hal ini dikarenakan program dan kegiatan propinsi sebagian di arahkan untuk kabupaten. Sehingga kerjasama untuk pencapaian kinerja yang maksimal sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program dan kegiatan yang ada.

D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan yang diinginkan wilayah tersebut. Dalam pengembangan wilayah ingin dicapai keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional / wilayah suatu kesatuan wilayah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah sumber daya terbatas, tetapi kebutuhan kita banyak oleh karena itu kita harus merencanakan ruang untuk mempertemukan kebutuhan dan keterbatasan. Dalam pengembangan wilayah, penataan ruang dapat memberikan

interfensi untuk mengarahkan pengembangan wilayah sesuai / mendekati rencana yang diinginkan melalui rencana tata ruang.

Kabupaten Banggai adalah daerah yang saat ini banyak dilirik oleh para investor, karena kekayaan alam yang dimiliki. Sehingga banyak pendatang yang tiap tahun meningkat jumlahnya. Kecepatan pembangunan di Kabupaten Banggai meningkatkan lajunya peningkatan populasi tetapi tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten.

Masalah yang tiap tahun dihadapi Kabupaten Banggai dan seolah belum mendapat jawaban dan penyelesaiannya adalah masalah pembenahan infrastruktur yaitu perbaikan drainasse.

Di Kabupaten Banggai masalah banjir bahkan sudah menjadi ancaman rutin tiap tahun, buruknya drainasse dan penebangan liar serta pembukaan lahan baru mengakibatkan hal ini terjadi, banjir yang berulang - ulang sering merusak sarana dan prasarana yang ada. Mungkin system pengendalian masalah banjir sudah selayaknya di kaji kembali.

Penyebab terjadinya hal tersebut antara lain adalah, **Pertama**, rencana tata ruang kabupaten tidak disesuaikan dengan keadaan wilayah, social dan ekonomi. **Kedua**, penataan ruang saat ini masih banyak berupa *Planning Paper* ketimbang sebagai *Planning Management*.

Oleh sebab itu perlunya tindakan nyata dan berkelanjutan untuk menghadapi masalah yang ada. Efektivitas sebagai instrument pengelolaan menuju pembangunan berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memperkirakan penataan ruang wilayah yang potensial, termasuk yang bersifat kemulatif jangka panjang dan sinergistik.

1. LINGKUNGAN STRATEGIS

Strategis adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Supaya misi dapat dicapai maka mesti ada keselarasan antara tujuan dan strategis. Dengan demikian, strategis merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan - kebijakan dan program - program.

Pemetaan lingkungan strategis perlu dilakukan baik dari lingkungan eksternal menyangkut peluang dan ancaman maupun lingkungan internal terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Secara rinci kondisi lingkungan strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai diuraikan sebagai berikut :

| FAKTOR INTERNAL | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---|
| KEKUATAN - S | | KELEMAHAN - W | |
| S1 | Struktur Organisasi yang jelas | W1 | Belum Meratanya kuantitas, kapasitas dan kualitas SDM |
| S2 | Memiliki eksistensi Kelembagaan yang Kuat | W2 | Belum Optimalnya sistem pelaporan yang aktual dan akurat |
| S3 | Dukungan Pimpinan | W3 | Lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas program |
| | | W4 | Sarana/Prasarana penunjang belum memadai |
| | | W5 | Kurangnya Sumber Pembiayaan untuk kelancaran program dan kegiatan |
| FAKTOR EKSTERNAL | | | |
| PELUANG - O | | ANCAMAN - T | |
| O1 | Kesempatan Mengikuti pendidikan dan latihan | T1 | Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak |
| O2 | Perkembangan dan pemanfaatan teknologi | T2 | |
| O3 | Dukungan sumber dana terhadap peningkatan sarana/prasarana untuk kelancaran program dan kegiatan | T2 | |
| | | T3 | Kompetensi pengelola Kegiatan yang belum memadai |

E. ISU - ISU STRATEGIS

Mencermati data yang ditemukan dari profil gender anak dan perempuan di Kabupaten Banggai maka diperoleh beberapa isu - isu prioritas yang akan di analisis. Adapun isu - isu prioritas untuk Kabupaten Banggai adalah tentang Keluarga Berencana, anak putus sekolah, anak penyandang cacat, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

1. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Meningkatnya data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun yang dilaporkan kepada pihak berwajib merupakan kejahatan yang tidak perlu ditolelir. Meskipun demikian disadari bahwa kasus / kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat pada Polres masih merupakan permukaan gunung es, dimana pada dasarnya jumlah kasus yang sebenar jauh lebih banyak dari yang tercatat itu. Demikian juga data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banggai.

Faktor penyebab semakin tinggi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan usia muda sehingga suami istri belum matang dalam berbagai hal sehingga emosinya mudah meledak sehingga memunculkan perilaku kekerasan terhadap pasangan.
- b. Kebanyakan suami berpandangan bahwa kekerasan merupakan upaya untuk menghentikan perselisihan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.
- c. Kurangnya pemahaman agama sehingga masing - masing (suami - istri) berbuat sesuai dengan kemauan sendiri, tanpa mempedomani ajaran agama.

2. ANAK PENYANDANG CACAT (APC)

Adapun yang menjadi persoalan penting sehubungan dengan anak penyandang cacat ini adalah “ apakah semua anak penyandang cacat telah mempunyai akses, peran, kontrol dan manfaat terhadap layanan pendidikan sebagaimana yang diperoleh oleh anak - anak yang normal ”.

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga Negara. Untuk memenuhi hak dasar setiap warga Negara itu pemerintah RI telah mencanangkan program wajib belajar Sembilan tahun untuk semua anak Indonesia sebagai anggota PBB juga telah menyepakati Declaration Education For All atau Pendidikan Untuk Semua di singkat PUS. Dan bila dihubungkan dengan *Convention On The Rights Of Children* (Konveksi hak - hak anak) menekankan beberapa prinsip dasar dalam pemenuhan hak - hak anak, yaitu :

- a. Non diskriminatif
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan prinsip - prinsip tersebut diatas maka anak penyandang cacat adalah warga Negara RI yang juga mempunyai hak untuk memperoleh layanan pendidikan. Dalam dunia pendidikan anak penyandang cacat ini disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Penggunaan istilah ini sebagai upaya para ahli pendidikan untuk tidak memberikan label yang negatif pada anak penyandang cacat. Meskipun berbagai program khusus untuk anak penyandang cacat telah disediakan seperti SDLB, SLB, pelatihan keterampilan hidup (life skill) sebagai bekal untuk hidup kelak yang diberikan oleh Dinas Sosial atau Dinasker dan lain - lain, namun belum semua anak penyandang cacat mempunyai akses dan partisipasi dalam pelayanan pendidikan disebabkan :

- a. Orang Tua. Para orang tua anak penyandang cacat masih ada yang merasa bahwa anak penyandang cacat merupakan kutukan terhadap keluarga, sehingga para orang tua yang memiliki anak penyandang cacat memandangnya sebagai aib. Oleh karena itu kebanyakan orang tua yang memiliki anak penyandang cacat selalu merasa malu dan selalu menyembunyikan anaknya bahkan ada yang *Over Protection*. Lebih jauh lagi ada orang tua

anak penyandang cacat yang tidak memberikan kesempatan pada anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.

- b. SDLB atau SLB sebagai lembaga pendidikan yang khusus untuk anak cacat belum dapat diakses oleh setiap anak penyandang cacat yang hidup di desa atau daerah pinggiran.
- c. SDLB / SLB merupakan lembaga pendidikan khusus yang hanya bias di akses oleh anak penyandang cacat yang mempunyai orang tua dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.
- d. Kebanyakan aparat sekolah biasa atau sekolah regular belum siap menerima anak berkebutuhan khusus untuk belajar disekolah yang dipimpinya hal ini disebabkan para guru memandang hal ini akan menambah pekerjaan mereka.

Berdasarkan beberapa factor sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka pemerintah harus melakukan reformulasi kebijakan tersebut *“peningkatan layanan pendidikan kepada anak penyandang cacat atau berkebutuhan khusus sebagai implementasi dari pendidikan untuk semua dan wajib belajar sembilan tahun”*.

3. KELUARGA BERENCANA

Di Kabupaten Banggai pelayanan dan sosialisasi telah mampu menjangkau seluruh wilayah di kabupaten, dan terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta KB setiap tahun. Pada prinsipnya dan seharusnya perempuan dan laki - laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan KB.

Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat beberapa factor yang menyebabkan rendahnya partisipasi laki - laki dalam KB sebagaimana dikemukakan berikut :

- a. Rendahnya komitmen politik dan strategi penentu kebijakan tentang peran laki - laki dalam KB lebih banyak ditujukan kepada perempuan dari pada kepada laki - laki.
- b. Factor social budaya yang bias gender sehingga menyebabkan adanya pandangan bahwa masalah KB itu adalah masalah perempuan, sehingga laki - laki cukup memberikan motivasi dan dukungan saja kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam KB. Selain itu ada juga pandangan bahwa KB adalah urusan perempuan karena perempuan mempunyai kodrat untuk hamil, melahirkan dan menyusui.
- c. Terbatas alternatif pilihan alat kontrasepsi untuk laki - laki, dimana kondom dipandang oleh laki - laki sangat ringan tetapi tidak nyaman, sementara MOP dianggap mempunyai resiko terlalu berat dan menakutkan.
- d. Faktor agama, belum ada kesepakatan ulama tentang masalah MOP atau masih ditemukan perselisihan pendapat para ulama (MUI) tentang MOP. Sebagian ulama memandang boleh sedangkan sebagian lagi masih memandang MOP haram dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

Berdasarkan data temuan tersebut hal tersebut yang akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mencari solusi

dan penyelesaian guna mensukseskan dan mendukung program pemerintah Kabupaten Banggai menuju Banggai Sejahtera.

4. ANAK PUTUS SEKOLAH

Meningkatnya angka putus sekolah bagi anak - anak usia sekolah di picu keadaan ekonomi yang semakin sulit, sementara biaya pendidikan semakin mahal. Program bantuan sekolah gratis bukan menjadi solusi terhadap permasalahan ini. Sebab tiap tahun ditemukan adanya anak usia sekolah yang masih tidak mengenyam bangku sekolah atau putus sekolah.

Berdasarkan data tersebut diatas maka ditemukan penyebab yang menjadi factor utama sehingga meningkatnya jumlah anak putrus sekolah :

- a. Sulitnya Lapangan pekerjaan dan perekonomian sehingga memicu orang tua untuk melibatkan anak mencari nafkah demi membantu perekonomian keluarga.
- b. Kurangnya perhatian dan komitmen orang tua dalam memberikan dukungan kepada anak untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Lemahnya koordinasi pihak sekolah dengan orang tua tentang upaya - upaya yang dilakukan agar anak merasakan sekolah bukanlah suatu tempat yang membosankan tetapi tempat yang menyenangkan.
- d. Program sekolah gratis tidak seperlunya dirasakan oleh masyarakat miskin dan keluarga prasejahtera karena masih ada sekolah - sekolah yang membebankan biaya pendidikan sebagian ditanggung oleh orang tua.

Dengan data temuan diatas maka hal ini menjadi prioritas dan perhatian dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk lebih mengoptimalkan kegiatan dalam bidang Perlindungan Anak dan mengupayakan hal - hal yang dapat mengatasi masalah tersebut guna mensukseskan tujuan dan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Banggai.

5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Program Pemerintah kabupaten Banggai yaitu Menjadikan Banggai Sejahtera membutuhkan kerja keras dan usaha yang sangat maksimal, karena di Kabupaten Banggai saat ini angka masyarakat miskin dan keluarga prasejahtera masih sangat tinggi.

Hal ini terlihat adanya ketimpangan - ketimpangan dalam social bermasyarakat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor :

- a. Tidak adanya kesempatan yang baik untuk bersaing dengan orang - orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi
- b. Keterbatasan Skill dan kemampuan yang di miliki oleh masyarakat Ekonomi Lemah (Masyarakat Miskin) untuk bersaing di dunia usaha teknologi canggih
- c. Angka kelahiran yang tiap tahun meningkat

- d. Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan - bantuan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan membuka kegiatan - kegiatan peningkatan keterampilan.
- e. Kurangnya lembaga - lembaga pelatihan keterampilan yang dapat membina wanita maupun masyarakat miskin untuk memperoleh tambahan penghasilan
- f. Lapangan Pekerjaan di sektor dunia usaha dengan basis teknologi hanya di kuasai oleh orang - orang dengan pendidikan yang tinggi
- g. Belum meratanya pembangunan di pedesaan
- h. Masih ditemukannya masyarakat buta aksara

Berdasarkan data temuan diatas maka akan menjadi tantangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dengan program dan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dengan adanya visi juga dimaksudkan, organisasi akan mampu dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini. Instansi pemerintah secara bertahap harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan ini harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal.

Tahapan yang dimaksud dimulai dengan perumusan Visi yang jelas dan mampu :

1. Menarik komitmen dan menggerakkan orang
2. Menciptakan makna bagi kehidupan organisasi
3. Menciptakan standar keunggulan
4. Menjembatani keadaan sekarang dan masa yang akan datang

Dasar - dasar perumusan visi hendaknya :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai suatu organisasi
2. Memberikan arah dan focus serta strategi yang jelas
3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi
4. Memiliki orientasi masa depan, sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi
5. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
6. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Untuk itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai menetapkan visi dan misinya yang mendukung pada perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai, yang secara khusus diangkat dari dalam lingkungan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana. Dengan demikian akan dapat memberikan inspirasi, semangat, inovasi, antisipatif dan produktif sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mampu dan eksis, melakukan tugas pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dibidangnya.

Dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana segenap jajaran pegawai dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, merumuskan dan menetapkan Visi sebagai berikut :

**Peduli terhadap kesetaraan gender perlindungan anak dan
Membangun gerakan Keluarga Berencana sebagai
Landasan
Membentuk keluarga kecil dan sejahtera
Dengan Motto “Dua Anak Cukup”**

Pernyataan visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sepenuhnya mengacu kepada pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Sudah selayaknya Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai, sepuhnya mendukung pemenuhan visi dari Pemerintah Kabupaten Banggai.

Adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai bentuk dari perwujudan visi adalah :

1. Mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
2. Mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang peduli terhadap perempuan dan anak
3. Melembagakan pengarusutamaan gender dan anak
4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk peningkatan, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak
5. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat akan program KB / KS
6. Menata kembali pengelolaan program KB / KS
7. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan tujuan didasarkan pada hasil analisis faktor penentu keberhasilan yang juga tetap memperhatikan keterkaitan dengan indikasi program didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten, Tujuan dan Sasaran ini merupakan apa yang akan dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan akhir tahun 2016 mendatang, dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- c. Meningkatkan disiplin aparatur
- d. Meningkatkan fasilitas pindah/purna tugas PNS
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- f. Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- g. Meningkatkan pencanaan umum
- h. Meningkatkan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- i. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- j. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- k. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- l. Meningkatkan keluarga berencana
- m. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja
- n. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi
- o. Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- p. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- q. Meningkatkan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- r. Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- s. Meningkatkan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- t. Meningkatkan pengembangan model oprasional NKB-Posyandu dan PAUD.
- u. Meningkatkan keluarga sejahtera

C. STRATEGI KEBIJAKAN

Tahapan selanjutnya setelah penetapan tujuan dan sasaran, adalah menetapkan kebijakan operasional yang dijabarkan didalam program dan kegiatan. Hal ini merupakan tahapan penting untuk mewujudkan misi dari Badan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun, dan direncanakan pembiayaan baik melalui APBN / APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk memahami apakah ada keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan, sebelum dilaksanakan perlu dievaluasi dengan berdasarkan criteria umum relevansi, signifikan, validitas, obyektifitas, ketepatan waktu dan kegunaan kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha, kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan dan misionis visi organisasi.

Pokok - pokok kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan tenaga pelayanan terhadap peserta KB yang berkualitas
2. Membuka kerjasama yang seluas - luasnya dengan LSM - LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan perempuan sehingga bias memberikan bantuan hukum terhadap kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan
3. Menyediakan data potensi jumlah anak putus sekolah, anak terlantar, sehingga bisa bekerjasama dengan pihak lain dengan mengiatkan pola orang tua asuh
4. Peningkatan sosialisasi dan informasi tentang KB kepada laki - laki dan pengembangan pelayanan KB untuk laki - laki
5. Menyediakan alat kontrasepsi dan pil KB bagi peserta secara gratis.
6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana KB bagi klinik pemerintah dan klinik swasta

Berikut tabel program dan kegiatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

| SEKRETARIAT : | |
|----------------------|--|
| PROGRAM | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none">1. Penyedia jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik3. Penyediaan jasa kebersihan kantor4. Penyediaan alat tulis kantor5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor7. Penyediaan alat rumah tangga8. Penyediaan makanan dan minuman9. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | 10. Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran |
| PROGRAM | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan meubelair 4. Pengadaan meubelair rumah singgah 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9. Pembuatan pagar halaman 10. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor |
| PROGRAM | PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu |
| PROGRAM | FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulangan pegawai yang pensiun |
| PROGRAM | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Penilaian angka kredit petugas fungsional |
| PROGRAM | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 3. Musyawarah rencana pembangunan kecamatan |
| PROGRAM | PENINGKATAN PERENCANAAN UMUM |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| BIDANG PERLINDUNGAN ANAK : | |
| PROGRAM | KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi UU perlindungan anak 2. Hari Anak Nasional 3. Pendataan dan Penyusunan data serta analisis permasalahan anak terlantar, putus sekolah dan anak jalanan 4. Pembinaan Tenaga Pelatih bagi Kelompok PAUD 5. Pelaksanaan orientasi/pelatihan pengisian Kartu Kembang Anak (KKA) bagi kader BKB dan ibu-ibu yang mempunyai anak balita 6. Pelaksanaan Orientasi Pendidikan Karakter Sejak Dini (PKSD) bagi kader dan TP-PKK 7. Pengadaan bahan kelengkapan sekolah bagi anak kurang mampu 8. Pelaksanaan Road Show Perlindungan Anak 9. Pengembangan kota layak anak 10. Pembangunan rumah singgah bagi anak jalanan, anak terlantar. Dan |

| | |
|--|--|
| | korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) |
| BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : | |
| PROGRAM | PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) 2 Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan anak 3 Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) 4 Pengadaan buku pedoman pembinaan dan penelantaran anak 5 Pengadaan brosur tentang pembinaan perempuan dan anak 6 Pembentukan Kelompok Kerja Pengerustamaan Gender 7 Sosialisasi Pengerustamaan Gender 8 Penyediaan advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan dan anak 9 Pelaksanaan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 10 Penyediaan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 11 Pelaksanaan penguatan dan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 12 Pelaksanaan Evaluasi PUG 13 Pembentukan POSDAYA 14 Pembentukan Desa Prima 15 Pengembangan dan pembinaan Desa Prima |
| PROGRAM | PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) 2 Pelaksanaan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 3 Workshop UU KDRT 4 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 5 Pelaksanaan Road Show Perlindungan Perempuan Terhadap KDRT 6 Pelaksanaan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 7 Pelaksanaan penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 8 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan |
| | 9 Pelatihan penyusunan anggaran dan program berbasis gender |
| | 10 Pelayanan terpadu terhadap saksi/korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) |
| PROGRAM | PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN |

| | |
|------------------------------------|---|
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan organisasi perempuan 2 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 3 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 4 Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 5 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) 6 Penyelenggaraan hari ibu 7 Pencapaian pendataan perempuan yang berkarya 8 Peningkatan usaha kelompok perempuan 9 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender |
| BIDANG KELUARGA BERENCANA : | |
| PROGRAM | KELUARGA BERENCANA |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan keluarga berencana 2 TNI Manunggal KB Kes 3 Monitoring, pencatatan, pelaporan dan stock opname alkon 4 Penyediaan operasional KUPT, PLKB dan Unit Pengelola Terpadu (UPT) 5 Pengadaan sarana dan prasarana KB/KS 6 Pelaksanaan pertemuan teknis/koordinasi dengan PLKB dan petugas klinik 7 Pelaksanaan pelatihan RR bagi petugas klinik 8 Penyediaan operasional/jasa medis swasta pengelola KB 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 Penyediaan operasional/jasa klinik KB Swasta 11 Penyediaan operasional/jasa klinik puskesmas 12 Operasional/pendistribusian alat kontrasepsi 13 Pelaksanaan Rakerda program KB 14 Penyediaan operasional Baksos dengan mitra kerja 15 Penyediaan operasional konseling KB bagi KUA |
| PROGRAM | KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pertemuan tenaga pengelola PIK KRR 2 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 3 Penyelenggaraan lomba penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 4 Penyediaan operasional pembinaan PIK-KRR 5 Penyelenggaraan work shop bagi pengelola PS/KS PIK Remaja 6 Penyelenggaraan pembinaan pengelola PIK Remaja se-Kabupaten Banggai 7 Pelaksanaan orientasi siswa saat masa orientasi siswa tentang PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) 8 Penyelenggaraan Lomba PIK Remaja 9 Penyediaan buku pedoman PIK Remaja bagi sekolah 10 Penyediaan operasional PIK Remaja/Mahasiswa 11 Pelaksanaan bimbingan teknis PIK Remaja/Mahasiswa |

| | |
|-----------------|---|
| PROGRAM | PENINGKATAN PELAYANAN KONTRASEPSI |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 2 Pengadaan Alat Kontrasepsi 3 Pelayanan KB medis operasi 4 Pelayanan KB keliling 5 Pelayanan TKBK kabupaten-kecamatan 6 Pengemasan alat kontrasepsi 7 Pelayanan TKBK dalam menunjang NKRI di Kab. Banggai |
| PROGRAM | PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Road show PKK KB Kesehatan 2 Kesatuan gerak PKK KB Kes 3 Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes 4 Rapat Kerja PPKBD |
| PROGRAM | PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan sayang ibu |
| PROGRAM | PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS di sekolah |
| PROGRAM | PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan buku petunjuk BKB kit |
| PROGRAM | TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan/catur bina BKB,BKR,BKL, BLK 2 Orientasi ketahanan keluarga bagi bina-bina (BKB,BKR dan BKL) 3 Pelatihan pengelola kelompok BKB |
| PROGRAM | PENINGKATAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL NKB-POSYANDU DAN PAUD |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pertemuan pengembangan model pelayanan terpadu (BKB, Posyandu, dan PAUD) bagi ketua kelompok BKB, Posyandu, dan PAUD |
| PROGRAM | PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA |
| KEGIATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelayanan KIE 2 Pelaksanaan HARGANAS 3 Penilaian PPKBD, Sub PPKBD, PKB dan lomba keluarga harmonis dan keluarga sejahtera 4 Bimbingan Teknis Kader BKB, BKR, BKL dan pemilihan BKB, BKR, BKL terbaik 5 Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 6 Orientasi kader pendata keluarga sejahtera 7 Operasional kelompok UPPKS 8 Pembinaan kelompok UPPKS 9 Operasional bina keluarga balita (BKB) 10 Operasional bina keluarga remaja (BKR) |

| | |
|--|---|
| | 11 Operasional bina keluarga lansia (BKL) |
| | 12 Orientasi BKB, BKR, BKL |
| | 13 Operasional pendataan keluarga |
| | 14 Sarasehan hasil pendataan keluarga |

Tabel 1
TARGET PEMBANGUNAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KAB. BANGGAI
UNTUK TAHUN 2011 - 2016

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Meningkatnya Administrasi Kantor | - Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Lembar | 2.220.900 | 2.220.900 | 13.695.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | |
| | | | - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tahun | 39.600.000 | 33.000.000 | 64.350.000 | 110.934.175 | 100.000.000 | 110.000.000 | |
| | | | - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | Paket Mix | 15.400.000 | 14.740.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 30.250.000 | |
| | | | - Tersedianya Alat Tulis Kantor | Paket Mix | 27.500.000 | 27.500.000 | 40.557.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 36.300.000 | |
| | | | - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Paket | 29.381.000 | 16.500.000 | 36.760.900 | 22.000.000 | 27.500.000 | 30.250.000 | |
| | | | - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | 1.650.000 | 3.300.000 | 20.900.000 | 27.500.000 | 1.100.000 | 1.210.000 | |
| | | | - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Paket | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - Tersedianya Makanan dan Minuman | Dos | 16.500.000 | 11.000.000 | 39.029.100 | 16.500.000 | 33.495.000 | 36.844.500 | |
| | | | - Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Ls | 153.890.000 | 191.268.000 | 361.708.600 | 330.000.000 | 424.545.000 | 466.999.500 | |
| | | | - Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran | Ls | - | - | - | 182.400.000 | 206.640.000 | - | |
| | | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | Buah | 37.675.000 | 24.970.000 | 20.619.500 | 22.000.000 | 14.520.000 | 15.972.000 |
| | | | | - Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | Unit & Buah | - | 20.054.540 | 36.377.000 | 33.000.000 | 60.000.000 | 66.000.000 |
| | | | | - Tersedianya Meubelair | Buah | 13.475.000 | 6.050.000 | 8.195.000 | 12.100.000 | 20.900.000 | 22.990.000 |
| | | | | - Tersedianya Meubelair Rumah Singgah | Buah | - | - | - | - | 50.000.000 | 55.000.000 |
| | | - Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor | | Paket | 16.500.000 | 53.248.630 | 279.400.000 | 55.000.000 | 30.000.000 | 33.000.000 | |
| | | - Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor | | Unit | 11.000.000 | 16.500.000 | 49.500.000 | 66.000.000 | 52.800.000 | 58.080.000 | |
| | | - Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | Unit | 1.100.000 | 924.000 | - | 3.300.000 | 3.520.000 | 3.872.000 | |
| | | - Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | Unit | 1.100.000 | 1.100.000 | 3.300.000 | 11.000.000 | 2.200.000 | 2.420.000 | |
| | | - Terpenuhinya Pembuatan Pagar Halaman | | Paket | - | - | - | 150.000.000 | 220.000.000 | 242.000.000 | |
| | | - Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | Paket | - | - | - | 400.000.000 | 440.000.000 | 484.000.000 | |
| | | Meningkatkan Kesejahteraan Disiplin Aparatur | | - Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Pasang | 44.000.000 | - | 18.480.000 | 66.000.000 | - | 72.600.000 |
| | | | | - Pemulangan pegawai yang pensiun | OT | 1.100.000 | 1.100.000 | - | 17.600.000 | 40.000.000 | 44.000.000 |
| | | Meningkatkan Fasilitas pindah / purna tugas PNS | | - Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal | Ls | 11.000.000 | - | - | 11.000.000 | 39.380.000 | 43.318.000 |
| | | | - Tersedianya Penilaian Angka Kredit Petugas Fungsional | Orang | 16.500.000 | 6.600.000 | 12.698.400 | 13.750.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | |
| | | Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Buku | 11.000.000 | 6.600.000 | 12.100.000 | 13.200.000 | 30.000.000 | 33.000.000 | |
| | | | - Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD | Buku | 44.220.000 | 41.800.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 60.000.000 | 66.000.000 | |
| | | | - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Paket Mix | 11.000.000 | - | - | - | - | - | |
| | | | - Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Meningkatkan Perencanaan Umum | - Tersedianya Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Buku | - | 14.280.750 | - | - | - | - | |
| | | | - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laporan | - | 8.800.000 | - | 5.500.000 | - | - | |
| | | Meningkatkan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak | - Terlaksananya Sosialisasi UU Perlindungan Anak | Orang | - | 11.000.000 | 44.000.000 | 33.000.000 | 88.000.000 | 96.800.000 | |
| | | | - Terselenggaranya Hari Anak Nasional | Orang | - | 16.500.000 | 36.300.000 | 22.000.000 | 112.500.000 | 123.750.000 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | |
|----|------------------|---|--|--------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | - Terpenuhnya Pendataan dan Penyusunan Data serta Analisis Permasalahan Anak Terlantar, Putus Sekolah dan Anak Jalanan | Buku | - | 22.000.000 | 36.300.000 | 33.000.000 | 30.000.000 | 33.000.000 |
| | | | - Tercapainya Pembinaan Tenaga Pelatih bagi Kelompok PAUD | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Pengisian Kartu Kembang Anak (KKA) bagi Kader BKB dan Ibu-Ibu yang Mempunyai Anak Balita | Orang | - | - | 24.200.000 | 22.000.000 | 28.600.000 | 31.460.000 |
| | | | - Terlaksananya Orientasi Pendidikan Karakter Sejak Dini (PKSD) bagi Kader dan TP-PKK | Orang | - | - | 22.000.000 | 22.000.000 | 28.600.000 | 31.460.000 |
| | | | - Terpenuhnya Pengadaan Bahan Kelengkapan Sekolah Bagi Anak Kurang | Orang | - | - | 165.000.000 | 176.000.000 | - | 193.600.000 |
| | | | - Terlaksananya Road Show Perlindungan Anak | Orang | - | - | - | 55.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 |
| | | | - Pembangunan Rumah Singgah Bagi Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | Paket | - | - | - | - | 200.000.000 | 220.000.000 |
| | | Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | - Terpenuhnya Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Orang | - | - | - | 22.000.000 | 62.500.000 | 68.750.000 |
| | | | - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Anak | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) | - | - | - | 20.900.000 | - | - | 22.990.000 |
| | | | - Tersedianya Buku Pedoman Pembinaan dan Penelantaran Anak | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Brosur Tentang Pembinaan Perempuan dan Anak | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dan Anak | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Penguatan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Evaluasi PUG | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terbentuknya Posdaya | - | - | - | - | - | 650.000.000 | 715.000.000 |
| | | | - Terbentuknya Desa Prima | - | - | - | - | - | 200.000.000 | 220.000.000 |
| | | | - Terselenggaranya Pengembangan dan Pembinaan Desa Prima | - | - | - | - | - | 55.000.000 | 60.500.000 |
| | | Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | - Tercapainya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) | Orang | - | 11.000.000 | - | 27.500.000 | 24.200.000 | 26.620.000 |
| | | | - Terlaksananya Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT | Orang | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Work Shop UU KDRT | Orang | - | - | 36.300.000 | 33.000.000 | 130.000.000 | 143.000.000 |
| | | | - Terlaksananya Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Road Show Perlindungan Perempuan Terhadap KDRT | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak | - | - | - | - | - | - | - |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | |
|-----------|--|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | - Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Program Berbasis Gender | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Pelayanan Terpadu Terhadap Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | - | - | - | - | - | 60.083.125 | 66.091.438 |
| | | Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | - Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan | Orang | 36.594.800 | - | - | 16.500.000 | 52.000.000 | 57.200.000 |
| | | | - Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terpentuhnya Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha | Orang | 22.000.000 | - | - | 16.500.000 | 70.000.000 | 77.000.000 |
| | | | - Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan | Orang | 11.000.000 | 11.000.000 | 49.500.000 | 16.500.000 | 55.000.000 | 60.500.000 |
| | | | - Tercapainya Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat (P2WKSS) | Orang | 99.000.000 | 88.000.000 | 125.400.000 | 137.500.000 | 175.000.000 | 192.500.000 |
| | | | - Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Ibu | Orang | 11.000.000 | 16.500.000 | 20.900.000 | 22.000.000 | 62.500.000 | 68.750.000 |
| | | | - Tercapainya Pendataan Perempuan yang Berkarya | Buku | - | 11.000.000 | 15.400.000 | 16.500.000 | 35.000.000 | 38.500.000 |
| | | | - Terlaksananya Peningkatan Usaha Kelompok Perempuan | Orang | - | - | 264.242.000 | 280.500.000 | 235.000.000 | 258.500.000 |
| | | | - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender | - | - | - | - | - | - | - |
| II | KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | Meningkatkan Keluarga Berencana | - Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana | Orang | - | - | - | 37.400.000 | 45.000.000 | 49.500.000 |
| | | | - Terselenggaranya TNI Manunggal KB Kes | Orang | 11.000.000 | 22.000.000 | 25.300.000 | 33.000.000 | 88.000.000 | 96.800.000 |
| | | | - Terlaksananya Monitoring, Pencatatan, Pelaporan, dan Stock Opname Alkon | Laporan | 13.533.300 | 13.640.000 | 15.400.000 | 16.500.000 | 26.000.000 | 28.600.000 |
| | | | - Tersedianya Operasional KUIP, PLKB dan Unit Pengelola Terpadu (UPI) | Orang | - | - | 123.620.200 | 132.000.000 | 134.400.000 | 147.840.000 |
| | | | - Terpentuhnya Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS | Paket | 1.369.830.000 | 1.197.027.029 | 3.705.210.740 | 3.527.233.325 | 8.448.636.875 | 9.656.500.563 |
| | | | - Terlaksananya Pertemuan Teknis/Koordinasi dengan PLKB dan Petugas Klinik | - | - | - | - | - | 55.900.000 | 61.490.000 |
| | | | - Terlaksananya Pertemuan RR bagi Petugas Klinik | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Operasional/Jasa Medis Swasta Pengelola KB | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terjadinya Operasional/Jasa Klinik KB Swasta | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terjadinya Operasional/Jasa Klinik puskesmas | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terpentuhnya Operasional/Pendistribusian Alat Kontrasepsi | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Rakerda Program KB | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Operasional Baksos dengan Mitra Kerja | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Operasional Konseling KB bagi KUA | Orang | - | 29.700.000 | 29.700.000 | 21.450.000 | 35.100.000 | 38.610.000 |
| | | | - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Buku | - | - | 25.708.100 | 24.000.000 | 35.000.000 | 38.500.000 |
| | | | - Tersedianya Pengadaan Alat Kontrasepsi | Set | - | - | 41.247.800 | - | - | - |
| | | Menyiapkan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja | - Terlaksananya Pertemuan Tenaga Pengelola PIK KRR | - | - | - | - | 22.000.000 | 39.000.000 | 42.900.000 |
| | | | - Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja | Sekolah | 16.500.000 | - | - | 22.000.000 | 26.000.000 | 28.600.000 |
| | | | - Terselenggaranya Lomba Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja | Orang | - | - | - | 22.000.000 | 26.000.000 | 28.600.000 |
| | | | - Tersedianya Operasional Pembinaan PIK KRR | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terselenggaranya Workshop bagi Pengelola PS/KS PIK Remaja | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terselenggaranya Pembinaan Pengelola PIK Remaja Se-Kabupaten Banggai | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Orientasi Siswa Saat Masa Orientasi Siswa tentang PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terselenggaranya Lomba PIK Remaja | Orang | - | 16.500.000 | - | 22.000.000 | 26.000.000 | 28.600.000 |
| | | | - Tersedianya Buku Pedoman PIK Remaja bagi Sekolah | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Operasional PIK Remaja/Mahasiswa | Sekolah | - | 16.500.000 | - | - | 26.000.000 | 28.600.000 |
| | | | - Terlaksananya Bimbingan Teknis PIK Remaja/Mahasiswa | - | - | - | - | - | - | - |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | |
|----|------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Meningkatkan Pelayanan Kontrasepsi | - Terpentuhnya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB - Terpentuhnya Pelayanan KB Medis Operasi - Terpentuhnya Pelayanan KB Keliling - Terlaksananya Pelayanan TKBK Kabupaten - Kabupaten - Terpentuhnya Pengemasan Alat Kontrasepsi - Terpentuhnya Pengadaan Alat Kontrasepsi - Terlaksananya Pelayanan TKBK dalam Menunjang NKRI di Kab. Banggai | - - - Paket Paket Paket Orang | - - - - 2.750.000 - - | - - - 11.000.000 2.750.000 - - | - - - - - - - | - 35.000.000 - - 27.500.000 3.300.000 210.732.500 110.000.000 | - 32.500.000 - - 52.000.000 6.600.000 58.500.000 - | - 35.750.000 - - 57.200.000 7.260.000 63.350.000 121.000.000 |
| | | Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KS yang Mandiri | - Terselenggaranya Road Show PKK KB Kesehatan - Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK KB Kes - Terlaksananya Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes - Terlaksananya rapat kerja PPKBD | Orang Orang Orang Orang | 33.000.000 11.000.000 11.000.000 - | 33.000.000 22.000.000 16.500.000 - | 37.400.000 26.400.000 25.300.000 - | 38.500.000 27.500.000 27.500.000 150.000.000 | 75.000.000 88.000.000 88.000.000 195.000.000 | 82.500.000 96.800.000 96.800.000 214.500.000 |
| | | Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat | - Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu | Kecamatan | - | - | - | - | 50.000.000 | 55.000.000 |
| | | Meningkatkan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS | - Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah | Sekolah | - | - | - | 16.500.000 | - | 18.150.000 |
| | | Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | - Tersedianya Buku Petunjuk BKB Kit | Buku | - | - | - | - | - | - |
| | | Meningkatkan Tenaga pendamping kelompok bina keluarga | - Terlaksananya Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan/catur bina BKB,BKR,BKL - Terlaksananya Orientasi ketahanan keluarga bagi bina-bina (BKB,BKR dan BKL) - Terlaksananya Pelatihan pengelola kelompok BKB | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| | | Meningkatkan Pengembangan Model Operasional NKB-Posyandu dan PAUD | - Terlaksananya Pertemuan pengembangan model pelayanan terpadu (BKB, Posyandu, dan PAUD) bagi ketua kelompok BKB, Posyandu, dan PAUD | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Meningkatkan Keluarga Sejahtera | - Terpentuhnya Pelayanan KIE - Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional - Terlaksananya Penilaian PPKBD, Sub PPKBD, PKB dan Lomba Keluarga Harmonis dan Keluarga Sejahtera - Terlaksananya Bimbingan Teknis Kader BKB, BKR dan BKL - Tersedianya Operasional PPKBD dan Sub PPKBD | Paket Orang Orang Kecamatan Orang | - - - - - | 16.500.000 55.000.000 27.500.000 - 16.500.000 | 14.300.000 113.300.000 24.200.000 - 22.000.000 | 18.150.000 66.000.000 26.400.000 - 27.500.000 | 84.500.000 195.000.000 26.000.000 32.500.000 70.200.000 | 92.950.000 214.500.000 28.600.000 35.750.000 77.220.000 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | OUTCOME/OUTPUT | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | |
|----|------------------|----------------|--|--------|--------|------|------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | - Terlaksananya Orientasi Kader Pendata Keluarga Sejahtera | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Operasional Kelompok UPPKS | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terpenuhiya Pembinaan Kelompok UPPKS | Paket | - | - | - | 16.500.000 | 26.000.000 | 28.600.000 |
| | | | - Tersedianya Orientasi Bina Keluarga Balita (BKB) | Paket | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Orientasi Bina Keluarga Remaja (BKR) | Paket | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Orientasi Bina Keluarga Lansia (BKL) | Paket | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Tersedianya Operasional BKB,BKR,BKL | Paket | - | - | - | - | 52.000.000 | 57.200.000 |
| | | | - Tersedianya Operasional Pendataan Keluarga | Paket | - | - | - | - | - | - |
| | | | - Terlaksananya Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga | Paket | - | - | - | - | - | - |